



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WENTY MARINA MINZA
2. Jabatan : WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
3. NHK : 837746

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.875.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 9 m2/16 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 7 m2/5 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA , HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 8 m2/15 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	380.000.000
1. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000		
2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER 2.7.G LUX AT Tahun 2010, WARISAN Rp. 100.000.000		
3. MOTOR, HONDA NF 125 TE Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000		
4. MOBIL, HONDA WRV RS Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	52.100.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.424.816.576
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.731.916.576



III. HUTANG

Rp. 636.587.785

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.095.328.791

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.